

HARI AMAL BHAKTI KE-77

Kanwil Kemenag DIY Bagikan Anugerah

YOGYA (KR) - Bersamaan momentum peringatan Hari Amal Bhakti (HAB) ke-77 Kementerian Agama (Kemenag), Selasa (3/1) hari ini, Kanwil Kemenag DIY membagikan Anugerah Publikasi Award Tahun 2022. Ajang ini berdasarkan produktivitas menulis berita melalui website Kanwil Kemenag DIY, media cetak dan media online.

Penyerahan penghargaan dilakukan di halaman Kanwil Kemenag DIY di Jalan Sukonandi 8, usai upacara HAB ke-77. "Media cetak termasuk SKH *Kedaulatan Rakyat* yang kami nilai cukup tinggi," tandas Kakanwil Kemenag DIY Masmin Afif didampingi Kepala Bagian TU Muntolib, Senin (2/1).

Lomba dibagi dalam 4 kategori, yakni Kantor Kemenag Kabupaten/Kota,

Madrasah Aliyah Negeri (MAN), Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN). Untuk kategori Kankemenag Juara I diraih Kantor Kemenag Kabupaten Kulonprogo dengan nilai 742, Juara II Kantor Kemenag Kota Yogyakarta mendapatkan nilai 619 dan Juara III Kantor Kemenag Kabupaten Gunungkidul memperoleh nilai 315.

Menurut Masmin, penganugerahan

ini terus dilestarikan tiap tahun, karena publikasi akan beriringan dengan prestasi. "Ibarat dua sisi mata uang, publikasi dan prestasi tidak dapat dipisahkan," sambung Kakanwil.

Untuk Kategori MAN, Juara I diraih MAN 4 Bantul dengan nilai 685, Juara II MAN 3 Bantul mengantongi nilai 423 dan Juara III MAN 1 Yogyakarta meraih nilai 373. Sedangkan kategori MTsN, Juara I MTsN 1 Bantul dengan nilai 1.060, Juara II MTsN 6 Bantul berhasil meraih nilai 728 dan Juara III MTsN 9 Bantul mendapatkan nilai 708.

Kategori MIN Juara I diraih MIN 2 Sleman dengan nilai 204, Juara II MIN 2 Bantul nilai 170 dan Juara III MIN 3 Gunungkidul nilai 126. **(Fie)-d**

3 Meninggal Sambungan hal 1

Tawang-Alastua sudah surut dan dapat dilalui KA kembali.

"Mulai Senin (2/1) pukul 01.00 pagi tadi, alhamdulillah banjir sudah surut dan berhasil dilalui kereta api dengan kecepatan terbatas, sehingga perjalanan kereta api mulai kembali normal," ungkap Manager Humas KAI Daop 4 Semarang Ixfan Hendri Wintoko.

Sementara itu cuaca cerah Senin kemarin dimanfaatkan warga Pati yang menjadi korban banjir untuk menjemur pakaian dan perabotan rumah. Kendati demikian, ketinggian air banjir rawa di sepanjang Sungai Juwana belum menandakan surut.

Penjabat (Pj) Bupati Pati Henggar Budi Anggoro ST MT sudah lapor kepada Gubernur Jateng Ganjar Pranowo di Semarang soal penanganan kebencanaan di Pati. Banjir awal Januari ini menyebabkan 11 kecamatan terendam dan banyak warga mengungsi. Secara khusus, juga dilaporkan dampak bencana alam di kawasan tinggi Sukolilo yang menyebabkan ratusan hektare sawah terendam banjir. **(Cry/Cuk)-d**

Boyolali Sambungan hal 1

Bupati Boyolali M Said Hidayat usai melakukan peletakan batu pertama mengatakan, masjid ini berbentuk joglo dan membawa pesan tradisi budaya Jawa. "Jadi nanti masjidnya berkonsep Jawa, yaitu joglo. Bangunan ini mengingatkan generasi muda, Jawa memiliki konsep bangunan yang tradisional dan indah," ujar Bupati Said, Senin (2/1).

Bupati mengatakan, untuk pembangunan masjid Gedhe tersebut ditargetkan pada tahun ini selesai. "Kami targetkan tahun 2023 ini selesai dan nantinya dapat digunakan untuk kegiatan ibadah," ujarnya.

Sekda Kabupaten Boyolali Masruri mengatakan, lokasi Masjid Gedhe memiliki luas sekitar 1,1 hektare, bangunan masjid 1.984 meter persegi dan mampu menampung 2.600 jemaah. "Kalau anggaran dalam hitungan kami sekitar Rp 50 miliar, kemudian di bagian pinggir masjid nanti ada bangunan kantor MUI dan sekretariat lainnya," jelasnya.

Masjid tersebut nantinya memakai konstruksi kayu, bagian pinggir masjid berjenis *gebyok* berbahan kayu jati kelas satu dan diukir di wilayah Jepara. Masjid ini memiliki *saka* (tiang) yang berjumlah 8 dan panjang 8 meter kayu utuh. Masjid tersebut memiliki tinggi 14 meter, dilengkapi menara.

Tokoh masyarakat Boyolali Seno Kusumoarjo mengatakan, pembangunan masjid tersebut tidak didukung APBD Boyolali, namun sifatnya gotong royong. **(R-3)-d**

PESAN SUZUKI JIMNY TAHUN INI Pengiriman Bisa Lebih Cepat



KR-Istimewa

Tampilan Suzuki Jimny generasi terbaru.

YOGYA (KR) - Generasi terbaru Suzuki Jimny hadir di Indonesia. Salah satu produk legendaris Suzuki ini diperkenalkan resmi pada ajang GIIAS. Direktur Marketing PT SIS Donny Ismi mengatakan, Suzuki Jimny telah melegenda dan menjadi bagian sejarah otomotif Indonesia. Sejak diperkenalkan sampai sekarang, Suzuki Jimny terjual lebih 500.000 unit di seluruh dunia negara Eropa, Jepang, India, ASEAN dan lainnya.

Terkait hal ini, PT Sumber Baru Mobil selaku main dealer mobil Suzuki area Yogyakarta, Kedu, Banyumas dan Jakarta mulai membuka pemesanan model baru Suzuki Jimny 4x4 per awal Januari 2023.

General Manager Sumber Baru Mobil Yogyakarta Rizki Indriananti, Senin (2/1) menyebutkan, SUV Suzuki Jimny 4x4 impor dari Jepang itu harga on the road (OTR) Yoga-Kedu-Banyumas berkisar Rp 400 juta. "Pengiriman mobil SUV langka ini lebih cepat, bisa dua bulan saja padahal tahun-tahun sebelumnya 9 bulan," tegasnya, seraya menyebut sebagai satu-satunya SUV Off Road Completely Built Up (CBU) Jepang, lama pengiriman Jimny 4x4 bergantung agen tunggal pemegang merek (ATPM).

Ditambahkan CEO Sumber Baru Mobil Hendra Kumiawan, Suzuki Jimny telah mendapatkan penghargaan Winner World Car Awards pada kategori World Urban Car dan Top Three In The World World Car Awards Kategori World Car Design Of The Year. **(Sal)-d**

Perppu

yang berdampak pada perekonomian nasional. Keberadaan Perppu ini mencabut keberlakuan UU Cipta Kerja. Perppu Cipta Kerja hadir dalam bentuk omnibus dengan jumlah 1.117 halaman. Sebagaimana dahulu UU Cipta Kerja, Perppu ini terdiri atas beberapa kluster, termasuk pula kluster ketenagakerjaan.

Jika dicermati, substansi Perppu ini ternyata sama dengan substansi UU Cipta Kerja dahulu. Hanya terdapat beberapa perbedaan. Pertama, rumusan Pasal 64 yang dimunculkan kembali, setelah sebelumnya dihapus oleh UU Cipta Kerja. Pasal 64 ini mengatur mengenai alih daya (*outsourcing*), bahwa perjanjian alih daya harus dibuat secara tertulis dan pemerintah akan menetapkan sebagian pelaksanaan pekerjaan alih daya dalam peraturan pemerintah pelaksana. Mengenai bentuk perjanjian yang tertulis sebenarnya tidak terdapat banyak pengaruh mengingat MoU alih daya umumnya telah dibuat secara tertulis.

Kedua, Pasal 67 yang hanya menyesuaikan terminologi *epenyang* dan *cacat* menjadi *penyang* dan *edisabilitas*. Ketiga, Pasal 84 yang

mana hanya memperbaiki kesalahan tulis yang terdapat dalam UU Cipta Kerja sebelumnya. Keempat, Pasal 88C yang melakukan penegasan aturan penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) hanya dapat ditetapkan bila nominalnya lebih tinggi dari Upah Minimum Provinsi (UMP) dan untuk penetapan UMK bagi kabupaten/kota yang belum memiliki UMK harus memenuhi persyaratan tertentu. Hal ini sebenarnya telah terdapat pengaturannya dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Kelima, dalam Pasal 88D terdapat penambahan frasa, bahwa formula penghitungan upah minimum tidak hanya bergantung pada variabel pertumbuhan ekonomi dan inflasi saja, namun juga variabel berupa *indeks tertentu*. Tidak terdapat penjelasan mengenai indeks tertentu tersebut. Menjadi pertanyaan apakah indeks tertentu itu ialah rata-rata konsumsi per kapita dan rata-rata jumlah anggota keluarga sebagaimana telah terdapat dalam PP 36/2021.

Keenam, terdapat penyisipan pasal baru pada Pasal 88F bahwa dalam keadaan tertentu pemerintah

dapat menetapkan formula upah minimum yang berbeda dengan formula penghitungan upah minimum yang sudah ada. Dalam bagian penjelasan, ekeadaan tertentu diartikan sebagai keadaan yang mencakup bencana yang ditetapkan oleh Presiden dan kondisi luar biasa perekonomian global dan/atau nasional. Keberadaan pasal ini menarik, secara implisit apakah kemudian dapat dimaknai bahwa hal ini merupakan penegasan bahwa tidak diperkenankan untuk menetapkan upah minimum menggunakan formula selain yang sudah ada dalam rangka upaya mencegah gugatan terhadap SK Gubernur tentang upah minimum setiap tahun?

Ketujuh, terdapat pula penambahan frasa dalam Pasal 92 bahwa struktur skala upah digunakan sebagai pedoman penetapan upah bagi pekerja yang memiliki masa kerja 1 tahun atau lebih. Penambahan frasa ini sebenarnya tidak terlalu signifikan fungsinya jika merujuk pada pengertian struktur skala upah ialah dokumen mengenai rentang upah terendah sampai tertinggi di perusahaan, yang mana pasti sudah melingkupi

berapapun masa kerja yang terdapat di dalam perusahaan.

Terlihat bahwa substansi antara Perppu dan UU Cipta Kerja tersebut tidak banyak berubah, perubahannya pun hanya sebatas pada perubahan terminologi dan penegasan pengaturan saja. Dapat dikatakan hanya terlihat berpindah wadah dari UU ke dalam Perppu saja. Jika demikian, maka ekegentingan memaksa yang seperti apa yang dimaksudkan oleh pemerintah sehingga diperlukan untuk menetapkan Perppu ini? Apakah hanya semata-mata untuk melakukan *epenghindaran* atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 saja? Mengenai hal ini tidak terdapat jawaban yang jelas dalam naskah Perppu Cipta Kerja. **(Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta)-d**

PEMBETULAN: Dalam Analisis edisi Senin (2/1) pada alinea 4 baris pertama (hal 7) tertulis nama peneliti BRIN Emma Yulihastin, seharusnya Erma Yulihastin. Dengan demikian kesalahan sudah diluruskan. Terima kasih

PERLU DIBUATKAN MONUMEN Yogya Pernah Menjadi Ibu Kota RI

YOGYA (KR) - Kepindahan Ibu Kota RI dari Jakarta ke Yogya, 4 Januari 1946 hingga 29 Desember 1949, adalah peristiwa bersejarah yang sangat penting bagi tegaknya NKRI.

Menurut Sejarawan UGM Bahauddin MHum, selama berdirinya RI sampai saat ini, tercatat hanya ada dua wilayah yang dijadikan sebagai ibu kota, yaitu Jakarta dan Yogya.

"Meskipun Yogya sempat diduduki oleh Belanda pasca Agresi Militer II, namun ibu kotanya tetap di Yogya," jelasnya.

Memang, pada 19 Desember 1948, Presiden Soekarno memberi mandat kepada Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk pemerintahan darurat RI di Bukittinggi, namun tidak memindahkan ibu kotanya dari Yogya.

Sayangnya, masih banyak warga masyarakat, khususnya generasi muda yang belum tahu bahwa Yogya pernah menjadi Ibu Kota RI. Kenapa demikian, menurut Bahauddin, pertama faktor materi sejarah di sekolah menengah yang kurang mendalam membahas mengenai hal itu. Kedua, masyarakat kita memang masih kurang literasi sejarahnya. "Mungkin Pemda DIY perlu membuat monumen Yogya Ibu Kota RI (1946-1949) yang ditempatkan di lokasi strategis," kata Bahauddin.

Dikatakan, kondisi keamanan di Jakarta yang tidak kondusif akibat keberadaan



KR-Wawan Isnanwan Bahauddin MHum

NICA sejak September 1945 menjadi penyebab utama pemindahan Ibu Kota RI dari Jakarta ke Yogya. Yogya, lanjut Bahauddin, dinilai paling layak menjadi ibu kota. Pertama, karena letak geografisnya yang berada di selatan Jawa. Kedua, ada jaminan politik dari pemimpin Yogya yaitu Sultan HB IX dan Paku Alam VIII. Ketiga, kepemimpinan Sultan HB IX dan Paku Alam VIII yang didukung penuh oleh seluruh rakyat Yogya. Keempat, Yogya sudah mempunyai birokrasi yang modern.

Selain itu, Yogya sebagai entitas politik pemerintahan lahir pada 1755, sedang RI baru lahir pada 17 Agustus 1945. Jadi ditinjau dari aspek usia, entitas politik pemerintahan Yogya lebih tua 200 tahun dibandingkan dengan RI.

"Maka ketika RI memindahkan ibu kota ke Yogya,

ibaratnya Yogya sebagai ibu asuh bagi RI yang 'masih balita' itu, untuk tetap survive menghadapi nafsu kolonialisme Belanda yang ingin menduduki Indonesia pasca Proklamasi Kemerdekaan," jelasnya.

Mengingat pentingnya peristiwa bersejarah kepindahan Ibu Kota RI dari Jakarta ke Yogyakarta, 4 Januari 1946 hingga 29 Desember 1949, Paniradya Kaistimewan DIY dan Sekber Keistimewaan DIY mengadakan kegiatan 'Sinu Sejarah Keistimewaan DIY', Rabu (4/1) pukul 13.00 di Ruang Jodipathi, SMA Negeri 1 Bantul, Jalan Wakhid Hasyim, Palbapang, Bantul.

Kegiatan ini sekaligus dimaksudkan untuk pembelajaran sejarah terutama pada pelajar.

Acara ini akan diawali pemutaran video dokumenter 'Yogya Ibu Asuh Republik'. Ada juga Dialog Keistimewaan 'Ibu Kota Negara Pindah ke Yogya' dengan narasumber Hendro Muhaimin MA (Tenaga Ahli Parampara Praja dari Pusat Studi Pancasila UGM), Bahauddin MHum (Sejarawan UGM), Agus Tony Widodo SPd (Ketua Asosiasi Guru Sejarah Indonesia/AGSI DIY, Guru Sejarah SMA Negeri 1 Bantul), Widhasto Wasana Putra (Ketua Sekber Keistimewaan DIY) dengan moderator Wiji Rachmadani.

Acara tersebut juga diakhiri pentas tari serta pentas musik oleh Askara Nuswantara. **(Wan)**

Indonesia Sambungan hal 1

Indonesia tampil lebih dominan. Sempat tekejut, Indonesia justru mampu mencetak keunggulan saat pertandingan berjalan 21 menit. Berawal dari lemparan Pratama Arhan, bola di dalam kotak penalti mampu disambut Dendy Sulistyawan dengan matang lewat sundulan bola yang begitu terarah.

Adalah gelandang muda, Marselino

Ferdinand yang sukses membawa Indonesia unggul 2-0.

Babak kedua, Indonesia masih berusaha keras untuk menambah gol. Umpan-umpan satu dua pemain Indonesia memberi Filipina kesulitan. Namun, Indonesia gagal mencetak gol tambahan. Malah, jala Indonesia jebol pada menit 82. **(Yud)-d**

YIA Sambungan hal 1

Manajemen PT Angkasa Pura (AP) 1 selaku pengelola YIA mengapresiasi penumpung terakhir 2022 dan pertama 2023. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT API

Yudi Rizkyardie Darun bersama Agus Pandu Purnama memberikan kalungan selendang batik, cenderamata dan *voucher* menginap di Grand Dafam Signature Kulonprogo kepada Iris, penumpang pesawat Lion Air JT 3569 dari Denpasar yang mendarat di YIA sebagai penerbangan terakhir di tahun 2022 pada pukul 20.05 WIB, 31 Desember 2022.

PT AP 1 YIA juga memberikan apresiasi pelepasan kepada penumpang pertama yang

berangkat melalui YIA 1 Januari 2023 dengan Lion Air JT 522 tujuan Banjarmasin, pukul 05.45 WIB.

Sementara itu Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat sebanyak 9.616.619 penumpang angkutan umum bepergian pada masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Jumlah ini merupakan angka kumulatif penumpang di semua moda, yang dihitung selama 14 hari masa pemantauan Senin (19/12) hingga Minggu (1/1) lalu. **(Rul/lmd)-d**



Prakiraan Cuaca					Selasa, 3 Januari 2023	
Lokasi	Pagi	Siang	Malam	Dini Hari	Suhu	Kelembaban
Bantul					23-31	70-95
Sleman					23-30	75-95
Wates					23-31	70-95
Wonosari					23-30	70-95
Yogyakarta					23-31	70-95

Zahrotus Sa'idah, SIKom, MA
Dosen Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta

NAMA restoran Karen's Diner beberapa minggu ini mencuri atensi masyarakat. Bukan karena makanan yang enak, namun karena konsep pelayanan yang terbilang cukup unik dan menghibur. Jika restoran lain mengusung

Fenomena Kehadiran Budaya 'Karen'

pelayanan yang ramah dan menjadikan tamu sebagai raja, sebaliknya, Karen's Diner justru memberikan pelayanan yang buruk bahkan tidak jarang membuat pengunjung naik darah. Karena itu restoran asal Australia ini memiliki moto Good Food, Terrible Service.

Penggunaan nama Karen sendiri bersumber dari bahasa slang yang merujuk pada arti 'suka mengeluh'. Di Australia istilah Karen umumnya digunakan pada mereka yang memiliki sifat menyebalkan karena dirinya merasa paling benar. Karena merujuk dari makna tersebut, maka pelayanan yang diberikan berkonsep menyebalkan, kasar, dan cenderung mengeluh karena melayani pembeli.

Meski memberikan pelayanan buruk, restoran cepat saji ini cukup ramai pengunjung. Banyak influencer yang berbondong-bondong membuat konten di restoran ini meskipun dalam konten tersebut mereka mendapatkan pelayanan yang buruk dan tidak sopan, seperti body Shaming, mengacak makanan yang dipesan pengunjung, mengacungkan jari tengah, mengumpat dan masih banyak lagi lainnya.

Buruknya layanan yang diberikan Karen's Diner secara tidak langsung menarik perhatian netizen untuk memberikan komentar kontra. Banyak yang menyangkan konsep

Karen's Diner yang dianggap tidak sesuai dengan etika yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia. Sebab, selama ini masyarakat Indonesia dikenal dengan keramahannya. Klaim tersebut dapat dilihat dari hasil survei Expat Insider 2022 versi Internations, bahwa negara Indonesia dinyatakan sebagai negara dengan masyarakat yang paling ramah sedunia. Oleh karena itu kedatangan Karen's Diner di Jakarta pada 15 Desember 2022 ini dianggap mencederai klaim tersebut.

Di balik respon kontra ini, sadar atau tidak Karen's Diner sampai saat ini justru ramai dikunjungi. Mereka seperti menikmati cemohan pelayan bahkan menganggap cemohan tersebut tidak lain merupakan hiburan. Tidak hanya itu saja, bahkan beberapa ada yang mencoba *re-roasting* pelayan Karen's Diner. Alih-alih marah, nama Karen's Diner semakin dikenal masyarakat, bahkan berulang kali menjadi topik yang hangat dibicarakan.

Jika kita amati, restoran ini cukup cerdas memanfaatkan situasi. Banyak restoran yang hadir dengan konsep unik, seperti makan dengan suasana berada di pesawat, kereta, kapal, alam bebas, atau berbau dengan hewan, dan masih banyak lagi lainnya. Namun, meski memiliki perbedaan nyatanya semua restoran memiliki konsep yang sama, yakni memberikan pelayanan terbaik.

Adanya kesamaan konsep itu yang membuat Aden Levin dan James Farrell mengambik konsep berbeda yakni 'memberikan pelayanan paling buruk'. Selain karena ingin berbeda, Karen's Diner hadir juga untuk memberikan sindiran pada budaya 'rude karens' yang ramai diperbincangkan di media sosial Australia. Dewasa ini banyak kalangan muda di Australia yang menunjukkan sikap menyebalkan, kasar dan semaunya tanpa memperdulikan sekitar. Oleh karenanya hadirnya Karen's Diner dinilai menyeimbangi sikap kalangan muda. Itulah kenapa menu yang disajikan di Karen's Diner lebih

mengarah pada kesukaan kalangan muda dibandingkan dengan kalangan tua, yakni makanan cepat saji.

Adanya Karen's Diner cukup menarik jika dilihat dari segi marketing, namun dari segi konsep penting untuk dikaji lebih dalam lagi, sebab di Indonesia kurang pas dengan konsep Karen. Namun, jika ingin mengadaptasi bisa dengan merujuk pada kebiasaan remaja di Indonesia, misalnya sikap 'ikut campur' atau hal-hal 'unik' lainnya. Dengan demikian Karen's Diner Indonesia akan lebih bernuansa Indonesia bukan nuansa Australia. ***

